

PELAYANAN SOSIAL BAGI KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS MELALUI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)

Azwina Az-Zahrah

Relawan Rumah Edukasi dan Literasi Al Qur'an (RELIQ), Kota Serang-Banten

Email: azwinalatua9@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan sosial bagi keluarga bermasalah sosial psikologis melalui lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3). keluarga bermasalah sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Upaya yang telah dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi permasalahan tingginya kasus keluarga-keluarga bermasalah salah satunya adalah dengan membentuk badan-badan yang secara khusus bertujuan untuk meminimalisir bahkan mengatasi permasalahan tersebut. LK3 atau Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga merupakan salah satu lembaga sosial yang menangani permasalahan dalam keluarga. Adapun maksud dan tujuan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah membantu mengatasi berbagai masalah sosial psikologis keluarga dalam rangka peningkatan taraf kesejahteraan dan ketahanan sosial keluarga melalui pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi dan pemberdayaan sosial bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain. Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini yaitu kajian literatur.

Keywords: Pelayanan sosial; keluarga; ketahanan sosial; LK3

A. Pendahuluan

Manusia tidak bisa lepas dari permasalahan kehidupannya. Seberapa jauh seseorang menghindari, masalah tersebut tetap akan mengikutinya. Realitasnya, ada orang yang bisa menghadapi permasalahannya sendiri namun ada pula yang tidak mampu menyelesaikan sendiri. Beberapa orang memerlukan bantuan untuk

mengurai dan menyelesaikan masalahnya. Beberapa orang ingin berkeluh kesah namun tidak tahu tempat yang tepat. Akibatnya, masalahnya tidak selesai, justru semakin berkembang luas.

Demikian pula dalam kehidupan keluarga. Hartomo dkk (2001:79) dalam Ribka menyebutkan bahwa keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Sama seleyaknya lembaga lainnya, keluarga yang merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat ini menjalankan peran, tugas dan fungsinya sendiri. Tidak semua keluarga mampu untuk menjalankan fungsi dan peranannya sebagai anggota keluarga. Tidak selalu perkawinan membawa keharmonisan dalam keluarga, perkawinan yang selalu dianggap sebagai lembaran baru dalam kehidupan manusia tak jarang mengalami pasang surut permasalahan. Fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik memicu timbulnya permasalahan, tidak terpenuhinya fungsi dan tidak terlaksanakannya peran anggota keluarga menjadi gambaran umum mengapa masalah muncul dalam suatu keluarga.

Perceraian merupakan salah satu dampak atau akibat dari adanya permasalahan dalam suatu keluarga yang sudah tidak menemukan jalan keluar untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Makna perkawinan menjadi pudar seiring dengan gaya hidup masyarakat yang semakin berkembang. Perceraian bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk dilakukan. Data Kementrian Agama Republik Indonesia menyebutkan, Tahun 2011 : menikah 2.319.821 kejadian, cerai 258.119 kejadian. Tahun 2012 : menikah 2.291.265 kejadian, cerai 372.577 kejadian. Tahun 2013 : menikah 2.218.130 kejadian, cerai 324.527 kejadian. Ambil data tahun 2012 dan 2013 saja, angka perceraian di dua tahun itu sekitar 350.000 kasus. Berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus perceraian, atau 40 perceraian setiap jam. Hal ini sudah bisa mengindikasikan banyaknya masalah keluarga yang sudah memasuki

kategori darurat. Ada kondisi darurat keluarga yang tidak mampu diselesaikan oleh keluarga itu sendiri, hingga mereka mengambil jalan pintas dengan perceraian. Padahal sesungguhnya masih akan terbuka banyak opsi apabila mereka bersedia untuk melakukan mediasi kepada pihak yang tepat dan memiliki kompetensi.

Dinas Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, mengklasifikasikan keluarga bermasalah sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Upaya yang telah dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi permasalahan tingginya kasus keluarga-keluarga bermasalah salah satunya adalah dengan membentuk badan-badan yang secara khusus bertujuan untuk meminimalisir bahkan mengatasi permasalahan tersebut. LK3 atau Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga merupakan salah satu lembaga sosial yang menangani permasalahan dalam keluarga.

Adapun maksud dan tujuan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah membantu mengatasi berbagai masalah sosial psikologis keluarga dalam rangka peningkatan taraf kesejahteraan dan ketahanan sosial keluarga melalui pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi dan pemberdayaan sosial bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain.

B. Pembahasan

Tinjauan Tentang Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu konsep yang dimana mempunyai arti dan pandangan yang sangat luas. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu

keadaan yang dimana keadaan terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti, makanan, pakaian, rumah serta pendidikan dan kesehatan. Konsep mengenai kesejahteraan sosial ditemukan dari adanya masalah sosial dari setiap individu, kelompok dan masyarakat yang mengalami keberfungsian sosial, baik itu karena faktor internal dalam keluarga maupun faktor eksternal keluarga.

Pengertian kesejahteraan sosial ini menunjukkan pada aktivitas dalam suatu organisasi baik itu organisasi internal maupun eksternal yang dimana hal ini untuk menunjukkan sebuah pelaksanaan pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama dalam suatu lingkungan keluarga. Kesejahteraan sosial dapat terwujud apabila ada proses pelayanan dan proses penyesuaian diri dari individu, kelompok dan juga masyarakat yang mengalami masalah sosial, setiap masalah yang dialami dapat dipecahkan dengan kemampuan dalam menghadapi masalah dan dalam menjalankan sebuah peran dan fungsi dari individu tersebut. Adapun konsep menurut Friedlander (Fahrudin, 2014:9) yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditunjukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Definisi di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial ini adalah suatu sistem yang dimana terorganisasi secara khusus dengan berbagai usaha sosial untuk menunjukkan perubahan dalam kehidupan menjadi lebih baik berdasarkan standar hidup dan kesehatan yang memadai sehingga dalam hal ini yang mempunyai masalah sosial menjadi keberfungsian sosial secara menyeluruh yang dijadikan

sebagai taraf hidup yang baik dengan dukungan lembaga maupun pihak pemerintah dengan adanya pelayanan – pelayanan sosial yang diberikan .

Kesejahteraan sosial sangat berperan dalam hal memperbaiki taraf hidup masyarakat yang mengalami masalah keberfungsian sosial seperti masalah – masalah sosial yang ada, seperti kemiskinan, anak jalanan, pemukiman kumuh dan lain-lainnya. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan yang terorganisir dan dinamis dengan segala keterampilan ilmiah, yang berusaha mengembangkan metodologi dari aspek strategi dan teknik untuk menangani masalah sosial dengan bertujuan untuk membantu individu dan keluarga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Menurut Soeharto (2014:1) Kesejahteraan Sosial adalah:

Suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Dari definisi di atas menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial disini adalah suatu lembaga/ institusi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga dengan diperhatikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial dalam hal meningkatkan kualitas hidup baik itu individu, kelompok maupun masyarakat, sehingga dalam hal ini menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial ini sangat berperan penting bagi masyarakat demi terciptanya keadaan yang nyaman dan sejahtera satu sama lain. Di Indonesia pengertian kesejahteraan sosial tidak dapat dilepaskan dari apa yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 (Isbandi, 2013:23) tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 ayat 1: “Kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Definisi menurut undang-undang dapat diartikan kesejahteraan sosial suatu kondisi yang dimana untuk terpenuhinya kebutuhan dasar baik itu secara materi, spiritual maupun kehidupan sosial dengan menunjukkan kehidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat dan dapat menjalankan fungsinya tanpa adanya gangguan secara formal maupun informal. Dalam hal ini dijelaskan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial harus adanya kerjasama baik itu di lembaga formal maupun di masyarakat dengan dukungan peran aktif dari pemerintah sehingga fungsi dan peran masyarakat dapat berjalan baik tanpa adanya gangguan ataupun disfungsional yang menyebabkan fungsinya terhambat.

2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dipandang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat, karena setiap anggota masyarakat ingin dirinya sejahtera dan berjalan kehidupannya sesuai fungsinya, akan tetapi ada faktor atau pengaruh dari luar bahkan dari dalam dirinya yang memunculkan adanya masalah sosial sehingga dalam hal ini pentingnya kesejahteraan sosial harus ditunjang dan diukung oleh berbagai belah pihak baik itu di masyarakat itu sendiri maupun peran di pemerintah. Fungsi dan tujuan dari kesejahteraan sosial harus sesuai apa yang di harapkan dari masyarakat sehingga fungsi dan peranannya berjalan efektif. Dalam hal ini maka setiap masyarakat mempunyai harapan dan keinginan untuk meraih kesejahteraan sosial dalam hidupnya karena sudah teratur juga di dalam peraturan dan undang - undang tertentu. Menurut Fachrudin (2014:10) Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat, dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan taraf hidup.

Dari penjelasan di atas disebutkan bahwa kesejahteraan sosial mempunyai tujuan dalam mencapai kehidupan yang sejahtera sehingga terjadinya penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat, agar tercapainya standar kehidupan yang baik. Menurut Schneiderman (Fachrudin, 2014 : 10) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem.

a. Pemeliharaan sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atas kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup orang seorang dan kelompok; norma - norma yang menyangkut pelaksanaan peranan anak-anak , remaja , dewasa dan orang tua, dan peranan pria dan wanita; norma -norma yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang dan jasa; norma-norma yang berhubungan dengan penyelesaian konflik dalam masyarakat dan lain-lainnya.

Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi anggota terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia pada masyarakat melalui pemberian informasi, nasehat dan bimbingan, seperti penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan lainnya. Kegiatan lain adalah kompensasi terhadap kekurangan sistem, berupa melengkapi atau mengganti tatanan sosial lain seperti keluarga, pasar, sistem pendidikan, sistem kesehatan, dan sebagainya, sementara tatanan sosial pokok pada dasarnya tidak berubah. Termasuk juga dalam kegiatan ini, bantuan keuangan dan pembayaran jaminan sosial untuk meningkatkan daya beli, guna terpeliharanya ekonomi secara keseluruhan, kompensasi ini sifatnya temporer.

b. Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi; menintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, Re-sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperhatikan penyimpangan tingkah laku misalnya kelompok remaja dan kelompok lain dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dapat diingatkan pengawasan diri sendiri (*self – control*) dengan jalan menghilangkan sebab-sebab masalah yang sesungguhnya. Di samping itu, dapat pula dipergunakan saluran-saluran dan batasan – batasan hukum guna meningkatkan pengawasan eksternal (*external- control*) terhadap penyimpangan tingkah laku misalnya orang tua yang menelantarkan anaknya, kejahatan, kenakalan remaja, dan sebagainya.

c. Perubahan sistem

Mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat (Fachrudin, 2014:11). Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk menyisihkan hambatan – terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber; sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

3. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi-fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan – perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi – konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Hal ini maka disebutkan bahwa kesejahteraan sosial memiliki peran dan fungsi

sangat penting bagi kehidupan manusia, baik itu secara individu, kelompok atau pun masyarakat. Adapun fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlander dan Apte yang dikutip oleh Fahrudin (2014:12) yaitu sebagai berikut ini:

1) Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2) Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosi, dan sosial agar yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3) Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4) Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang kesejahteraan sosial yang lain.

Dari pengertian di atas menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan sosial ini untuk proses pertolongan pekerja sosial terhadap individu, kelompok maupun masyarakat guna meningkatkan keberfungsian sosial sehingga dalam suatu masalah sosial yang ada di kehidupan ini guna menyelesaikan masalah sosial yang ada

dengan cara adanya pelayanan-pelayanan sosial terhadap masyarakat. Kesejahteraan sosial juga berfungsi untuk pengembangan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat.

Prinsip dasar pengembangan masyarakat yaitu pembangunan yang terintegrasi, menghilangkan ketimpangan dan ketidakberuntungan struktural, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), pemberdayaan masyarakat serta memperkuat perpaduan proses dan hasil pembangunan berdasarkan konsensus, kerjasama dan partisipasi. Fungsi yang selanjutnya yaitu penunjang tentunya suatu sistem tidak dapat berjalan tanpa satu unsur yang berjalan untuk menjalankan sistem semua unsur harus berjalan serta bekerja sama, sebagai contoh kesejahteraan sosial sebagai penunjang medis, hak asasi manusia, politik, hukum, ekonomi, dan agama. Dari fungsi-fungsi kesejahteraan sosial yang sudah dijelaskan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan terorganisir untuk mengfungsikan sosial kembali individu, kelompok, masyarakat.

Tinjauan Tentang Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha Kesejahteraan sosial pada umumnya hanya disebut pelayanan-pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah, instansi, atau lembaga tertentu, hal tersebut bertujuan untuk memberikan solusi dalam penyelesaian masalah – masalah sosial, akan tetapi usaha yang diberikan harus berjalan sesuai sistem dalam hal mewujudkan pengembangan kesejahteraan sosial sehingga mampu memelihara dalam proses dan pengakhirannya. Pengertian Usaha kesejahteraan sosial menurut Friedlender yang dikutip oleh Fachrudin (2014:15) yaitu:

Kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber-sumber manusia, dan kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial,

kesejahteraan anak, pencegahan kriminalitas, kesehatan mental, kesehatan masyarakat, pendidikan rekreasi, perlindungan buruh dan perumahan.

Usaha Kesejahteraan sosial ini ditunjukkan pada individu, kelompok, masyarakat yang bertujuan untuk mencegah atau menangani masalah sosial yang ada dengan cara adanya pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh komunitas, lembaga, instansi atau pemerintah dalam hal memberikan perlindungan dan pemeliharaan sumberdaya manusia sehingga terjadinya keseimbangan dalam menjalankan hidup sesuai fungsi dan perannya. Dalam UU No 6 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa “usaha kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program dan kegiatan yang ditunjukkan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial”. Sementara dalam UU No. 11 tahun 2009 dinyatakan usaha kesejahteraan sosial itu merupakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

2. Tujuan Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial pada suatu organisasi / lembaga yang menyediakan layanan sosial dalam pandangan yang lebih luas seringkali disebut dengan nama organisasi pelayanan masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan pelayanan masyarakat dalam mengadakan usaha kesejahteraan sosial. Menurut Schneiderman (Isbandi, 2012:87) menyatakan tiga tujuan dari suatu organisasi pelayanan masyarakat menyediakan Usaha Kesejahteraan Sosial:

1. Tujuan Kemanusiaan dan keadilan

Tujuan ini bersumber dari gagasan ideal demokratis tentang keadilan sosial, dan hal ini berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk

mengembangkan potensi diri mereka yang dimiliki, meskipun terkadang potensi tersebut adanya hambatan fisik, sosial, ekonomi, kejiwaan maupun faktor lainnya. Usaha kesejahteraan sosial menjadikan mereka sebagai kelompok sasaran dalam upaya menjembatani kelangkaan sumber daya yang mereka miliki.

2. Tujuan yang terkait dengan pengendalian sosial

Tujuan ini berkembang berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang tidak diuntungkan, kekurangan, ataupun tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya akan dapat melakukan serangan atau menjadikan ancaman bagi kelompok masyarakat yang sudah mapan, oleh karena itu kelompok masyarakat yang sudah mapan berupaya mengamankan diri mereka dari sesuatu yang dapat mengancam kehidupan, pemilikan maupun stabilisasi yang sudah ada.

3. Tujuan yang terkait dengan pembangunan ekonomi

Tujuan pembangunan ekonomi memprioritaskan pada program-program yang direncanakan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa, serta berbagai sumber daya yang dapat menunjang serta memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi. Dalam hal ini maka disebutkan bahwa pembangunan ekonomi ini harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat dengan itu maka akan berdampak baik pada kelangsungan kehidupan sesama.

Dari pernyataan di atas dijelaskan bahwa tujuan usaha kesejahteraan sosial dalam pelayanan organisasi sosial di masyarakat adalah suatu tindakan dalam membangun usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak terkait dengan bermaksud dalam mencapai kesejahteraan sosial yang merata sehingga masyarakat mampu dalam menjalankan fungsi sosialnya.

3. Fokus Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha Kesejahteraan sosial pada umumnya berbentuk dari pelayanan sosial sebagai kegiatan - kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung

berhubungan dengan pemeliharaan, pendampingan dan perlindungan terhadap individu yang mengalami masalah sosial. Merujuk pada definisi *welfare* dari Howard Jones yang dikutip oleh Soeharto (2014:8), mengatakan bahwa: “Tujuan Usaha Kesejahteraan Sosial yang utama dan pertama adalah penanggulangan kemiskinan dan manifestasinya”, seperti rendahnya pendapatan atau rumah tidak layak huni, melainkan pula bentuk masalah yang berkaitan anak jalanan, penelantaran anak, ABH (Anak Berhadapan Hukum) dan *broken home*. Soeharto (2014:9) mengungkapkan bahwa: “Usaha Kesejahteraan Sosial memfokuskan pada 3 bidang , yaitu: pelayanan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat”. Maksudnya, usaha kesejahteraan sosial memfokuskan kepada pelayanan yang diberikan oleh pemerintah seperti jaminan sosial dan pelayanan terhadap anak dan keluarga.

Tinjauan Tentang Pelayanan Sosial

1. Pengertian Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan pelayanan yang diberikan oleh suatu pihak yang terkait yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial, keberfungsian sosial dan perpecahan sosial yang sifatnya patologis ataupun non patologis yang didukung oleh pemerintah, intansi, lembaga sehingga memperoleh hasil positif sebagai adanya suatu perubahan. Pelayanan sosial menurut Kahn, (Fachrudin, 2014:51) adalah:

Pelayanan sosial dapat ditafsirkan dalam konteks kelembagaan sebagai terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.

Konteks tersebut memberikan arti bahwa pemberian pelayanan sosial didasarkan atas kebutuhan, sehingga walaupun orang tidak mampu membayar, tetap akan diberi pelayanan yang dibutuhkannya. Idealnya, pelayanan – pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, pelatihan kerja dan pelayanan sosial personal dengan profesi pekerjaan sosial akan membantu orang-orang yang mengalami masalah sosial dan orang – orang miskin, termasuk untuk dapat menjangkau pelayanan – pelayanan yang dibutuhkan. Adapun definisi pelayanan sosial menurut Romanyshyan (Fachrudin, 2014:51), memberikan arti pelayanan sosial sebagai berikut:

Pelayanan sosial sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu dan keluarga melalui (1) sumber-sumber sosial pendukung, dan (2) proses-proses yang meningkatkan kemampuan individu, keluarga dan masyarakat, sehingga dapat hidup dengan normal dan sejahtera melalui sumber-sumber pendukung yang memadai.

Konsep pelayanan sosial di atas dapat diartikan sebagai usaha dalam hal mengembalikan keberfungsian sosial seseorang dengan cara memanfaatkan fasilitas – fasilitas yang di berikan dengan adanya pelayanan-pelayanan yang dijadikan tunjangan pendukung dalam menghadapi masalah sosial baik itu pada individu, kelompok maupun masyarakat.

2. Fungsi Pelayanan Sosial

Perhatian pemerintah dan masyarakat secara umum terhadap perlunya standar kehidupan yang lebih baik, telah mendorong terbentuknya berbagai pelayanan sosial. Pelayanan sosial itu sendiri, pada dasarnya merupakan suatu program atau pun kegiatan yang didesain secara konkret untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf pada individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas, ataupun komunitas sebagai suatu kesatuan.

Pada pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi kehidupan yang diharapkan oleh masyarakat tidak dapat terwujud bila tidak dikembangkan usaha kesejahteraan sosial, baik oleh pihak pemerintah, organisasi, maupun dunia usaha. Maka dalam hal ini pelayanan sosial diadakan untuk melindungi, mengadakan perubahan atau menyempurnakan kegiatan - kegiatan pendidikan, asuhan anak, penampilan nilai dan pengembangan hubungan sosial. Menurut Kahn (Fachrudin, 2014:55) pelayanan sosial mempunyai beberapa fungsi yang dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan, pelayanan ini diadakan untuk melindungi, mengadakan perubahan atau menyempurnakan kegiatan - kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan fungsi diri sendiri sehingga terbentuknya jati diri yang dimiliki oleh individu di lingkungan keluarga.
- b. Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan dan rehabilitasi, pelayanan ini diberikan untuk memberikan pertolongan kepada individu, kelompok atau masyarakat yang mengalami masalah sosial baik itu secara fisik atau non fisik yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman dan kembalinya kepercayaan dirinya.
- c. Pelayanan sosial untuk mendapatkan akses, informasi dan nasehat, pelayanan ini mencakup dalam pemberian informasi mengenai hal yang berkaitan dengan masalah yang ada pada diri individu di lingkungan keluarga dengan memberikan arahan serta petunjuk apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Dari penjelasan di atas disebutkan bahwa pelayanan sosial mempunyai fungsi dalam mengembangkan potensi dan fungsi diri sendiri, memberikan pertolongan kepada individu, kelompok atau masyarakat yang mengalami masalah sosial dan

pelayanan sosial menjadikan tempat informasi yang berkaitan dengan masalah yang ada pada diri individu baik itu di lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga.

Tinjauan Tentang Keberfungsian Sosial

1. Pengertian Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial memiliki kemampuan atau kapasitas dalam hal memenuhi atau merespon kebutuhan dasarnya (pendapatannya, pendidikan, kesehatan), melaksanakan peran sosial sesuai dengan status dan tugas – tugasnya serta dalam hal menghadapi goncangan dan tekanan, misalnya, masalah psikososial, krisis ekonomi. Fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial untuk melakukan intervensi yang bertujuan atau bermakna.

Keberfungsian sosial merupakan konsepsi penting bagi pekerjaan sosial. Ia merupakan pembeda antara pekerjaan sosial dan profesi lainnya. Menurut Soeharto, (2014: 28), definisi keberfungsian sosial adalah:

Kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/ merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan (*shock and stresses*)”.

Dari pernyataan di atas bahwa keberfungsian sosial ini bertujuan dalam hal melaksanakan peranan orang (individu, kelompok maupun masyarakat) sesuai status dan tujuan pada hidupnya sehingga tercapai suatu tujuan tertentu dengan memecahkan masalah sosial yang ada pada kehidupannya. Keberfungsian sosial yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia karena setiap orang mempunyai prinsip dan dasar pada kehidupannya akan tetapi banyak orang yang mengalami masalah sosial akan tetapi ia tidak mampu dalam memecahkan masalah tersebut maka dalam hal ini dibutuhkan pekerja sosial.

2. Konsep Keberfungsian Sosial

Konsep keberfungsian sosial tidak terlepas dari karakteristik orang dalam konteks lingkungan sosialnya. Konsep keberfungsian sosial Menurut Siporin (Fachrudin : 2014:42), yaitu: “Keberfungsian sosial menunjuk pada cara – cara individu – individu maupun kolektivitas dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kehidupannya dan memenuhi kebutuhannya”.

Pada pernyataan di atas dijelaskan bahwa keberfungsian seseorang sangat berkaitan dengan peranan-peranan sosialnya, keberfungsian sosial juga dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dalam menampilkan beberapa peranan yang diharapkan oleh anggota atau yang dapat ditampilkan oleh setiap orang. Setiap individu mempunyai cara tersendiri untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan suatu kehidupannya untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi akan ada masalah – masalah yang akan menghambat dalam proses yang akan dicapainya itu maka dalam hal ini peran individu tersebut dengan bantuan pertolongan pekerja sosial dibutuhkan.

Pekerja sosial berhubungan dengan keberfungsian sosial semua orang tapi prioritasnya yaitu pada masalah pemenuhan kebanyakan anggota-anggota masyarakat yang rentan. Pada dasarnya masyarakat yang rentan ini adalah korban situasi pengabaian, ketidakadilan sosial, diskriminasi dan penindasan.

Intervensi Pekerjaan Sosial

1. Pengertian Pekerjaan Sosial

Intervensi pekerjaan sosial ini dibutuhkan dalam hal proses pertolongan yang dilakukan oleh pekerja sosial, dalam proses pertolongan yang diberikan diperlukan adanya suatu aksi dalam hal mengembalikan atau memecahkan masalah sosial sehingga klien tersebut berfungsi secara sosial kembali. Pekerjaan sosial sebagai sebuah bidang keahlian atau profesi yang berarti memiliki landasan keilmuan dan

seni dalam praktiknya. Pekerja sosial berbeda dengan profesi lain, misalkan psikolog, dokter atau psikiater. Sebagai ilustrasi, pada saat mengobati pasien seorang dokter hanya memfokuskan perhatian pada penyakit pasien saja. Saat menghadapi klien, seorang pekerja sosial tidak hanya melihat klien sebagai target perubahan, melainkan pula mempertimbangkan lingkungan atau situasi sosial dimana klien berada.

Pekerjaan sosial memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui interaksi agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan, kekhasan pekerja sosial adalah pemahaman dan keterampilan dalam memanipulasi perilaku manusia sebagai makhluk sosial, menurut Siporin yang dikutip oleh Fahrudin (2012:61) mengemukakan:

Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka selain itu pekerja sosial adalah suatu institusi sosial, suatu profesi pelayanan manusia, dan suatu seni praktik teknik dan ilmiah.

Dari pengertian di atas pekerjaan sosial merupakan suatu profesi dalam suatu kelembagaan sosial dalam proses pertolongan secara profesional yang bertujuan dalam hal mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial dengan memberikan pelayanan secara penuh kepada klien baik itu individu, kelompok maupun masyarakat. Pada proses pertolongan pekerja sosial dibutuhkan metode, peran dan tahap-tahap dalam melakukan proses pertolongannya sehingga sesuai prosedur dan dasar dari kode etik pekerja sosial profesional.

2. Tujuan Intervensi Pekerjaan Sosial

Intervensi pekerjaan sosial ini dilaksanakan sebagai proses pertolongan pekerja sosial dalam hal menangani masalah klien, yang dimana dalam proses penanganannya ini baik secara kuratif, preventif maupun secara edukatif.

Intervensi ini dilakukan berdasarkan metode-metode, tahap-tahap dan proses pertolongan yang dilakukan pekerja sosial secara profesional berdasarkan ilmu dan pengalaman yang didapat secara edukasional. Tujuan pekerjaan sosial menurut Zastrow yang dikutip oleh Fahrudin (2012:66) adalah :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
- 2) Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
- 3) Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerja sosial.
- 4) Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

Dari tujuan pekerjaan sosial di atas dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial diperlukan adanya kebijakan, pelayanan yang dilakukan oleh instansi atau lembaga sosial terkait dalam upaya mengurangi kemiskinan dan bentuk - bentuk ketidakadilan sosial, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya praktek pekerja sosial dalam menjalankan proses pertolongan yang dilakukan secara profesional. Selain pengertian di atas adapun menurut, Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) dikutip oleh Fahrudin (2014:67) mengemukakan tujuan praktek pekerja sosial sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
- 2) Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.

- 3) Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerja sosial.
- 4) Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

Pekerja sosial pada dasarnya untuk mengetahui dan memahami intervensi dalam praktek pertolongan pekerjaan sosial berdasarkan landasan konseptual dari intervensi itu sendiri sehingga dalam kajian kasus intervensi praktek pekerjaan sosial berdasarkan teori-teori dalam melakukan intervensi pekerjaan sosial. Intervensi pekerjaan sosial adalah upaya perubahan terencana yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap individu, kelompok, maupun komunitas agar upaya bantuan yang diberikan dapat dievaluasi dan diukur keberhasilannya sehingga upaya dalam memperbaiki keberfungsian sosial ini tepat sasaran pada perubahan yang akan dicapai yang dimana merujuk pada keberfungsian sosial pada suatu kondisi dimana seseorang dapat berperan sebagaimana seharusnya sesuai dengan harapan lingkungan dan peran yang dimilikinya.

3. Fungsi-Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial merupakan profesi yang dimana bergerak pada suatu proses pertolongan profesional yang memiliki tugas pokok membantu orang agar berfungsi sosial kembali dengan jalan memberikan berbagai kemungkinan agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya, dalam hal ini maka seseorang harus dibantu apabila ia sudah bertolak belakang dengan fungsi dan peran individu tersebut, sehingga memiliki kepribadian dan perannya dalam menjalani kehidupannya berguna baik itu dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat sekitar. Fungsi – fungsi pekerja sosial dalam Jusman (2013:5) tentang fungsi-fungsi pekerjaan sosial, yaitu :

- 1) Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial,

sehingga sistem ini dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.

- 2) Menjamin tingkat subsistensi, kesejahteraan yang wajar dan memadai bagi semua orang.
- 3) Memberikan kemungkinan kepada orang agar mereka dapat berfungsi sosial secara optimal dalam peranan dan status kelembagaan sosial mereka.
- 4) Mendukung dan memperbaiki tertib sosial serta struktur kelembagaan masyarakat.

Dari fungsi-fungsi pekerjaan sosial di atas dijelaskan bahwa pekerja sosial yang berperan penting dalam memecahkan atau mengembalikan keberfungsian setiap individu, hal tersebut membantu agar dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan dasar setiap individu, karena setiap individu mempunyai tanggung jawab dan peran yang harus diperjuangkan dalam kehidupannya, setiap orang yang hidup otomatis harus memiliki tujuan hidup kedepannya, akan tetapi permasalahan yang akan menghambat fungsi dan peran dalam kehidupannya akan selalu ada dengan sifatnya menghambat kehidupannya, maka dalam hal ini dibutuhkan profesi yang fokusnya membantu atau memberikan proses pertolongan secara profesional berdasarkan metode dan tata cara keilmuannya dan berdasarkan pengalamannya.

Pekerja sosial dalam menjalankan fungsi pekerja sosial dibutuhkan sistem sumber atau sebuah pelayanan penunjang dalam memberikan solusi yang dialami oleh kliennya, hal tersebut bertujuan dalam memberikan fasilitas-fasilitas setiap individu atau keluarga yang mengalami masalah sosial dalam kehidupannya. Proses menciptakan kesejahteraan sosial ini perlu ditunjang oleh berbagai belah pihak, baik itu pihak masyarakat maupun pihak pemerintah, pekerja sosial disini sebagai alat atau orang yang akan membawa individu pada proses pemecahan masalah yang ada pada dirinya. Fungsi dan peran pada kelembagaan sosial ini harus dimaksimalkan dengan cara sosialisasi pekerja sosial pada masyarakat sebagai

bentuk pelayanan yang diperuntukan oleh masyarakat, pekerja sosial disini sebagai penghubung antara kelembagaan sosial dengan masyarakat bahwa arti penting kesejahteraan setiap individu atau keluarga sangat diharapkan dalam meningkatkan pembangunan negara dan kesejahteraan sosial setiap individu.

4. Fokus Intervensi Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial merupakan suatu profesi pertolongan profesional individu, kelompok maupun masyarakat yang fokus pertolongannya pada permasalahan sosial setiap individu dengan cara mengembalikan keberfungsian sosial individu dengan cara metode dan tahap yang diberikan secara berkala. Fokus intervensi pekerjaan sosial adalah fokus yang ditunjukan kepada orang atau kelayan, baik individu, kelompok, maupun masyarakat yang bersifat residual ataupun institusional, secara langsung maupun tidak langsung, yang dilandasi oleh seperangkat pengetahuan dan keterampilan dan kode etik. Berkaitan dengan hal ini, menurut Iskandar yang dikutip oleh Suharto (2014:5) mengemukakan tentang fokus intervensi pekerjaan sosial adalah:

Fokus intervensi pekerjaan sosial berhubungan dengan kemampuan pekerja sosial untuk memusatkan perhatiannya, baik terhadap usaha klien melihat aspek penting dari situasi tersebut, maupun memegang teguh beberapa kesimpulan dari fokus tersebut atau kemajuan yang telah dicapai. Hal ini berarti bahwa pekerja sosial harus dapat memahami satu aspek masalah atau alternatif pemecahannya.

Dari pengertian di atas menunjukan bahwa fokus intervensi pekerjaan sosial ini ditujukan pada perhatian atau rasa empati pada individu dengan memperhatikan situasi sosialnya dan latar belakang permasalahan individu tersebut karena dengan memusatkan pada fokus masalah tersebut maka pekerja sosial akan menyimpulkan atas dasar aksi sosial dari latar belakang klien tersebut sehingga akan mengalami kemajuan yang akan dicapai. Dalam proses pertolongan pekerja sosial yang harus diperhatikan oleh pekerja sosial ini adalah langkah efektif dalam proses

penanganan masalah individu dengan berbagai keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh pekerja sosial karena hal tersebut akan mempermudah dalam proses pemecahan masalah sosial individu tersebut.

Intervensi pekerjaan sosial yang dilakukan pada lingkungan keluarga dalam program LK3 ini dengan cara memberikan pemusatan masalah dan pemecahan masalah berdasarkan langkah dan keputusan dari setiap individu, dalam hal ini LK3 hanya memberikan pengarahannya atau solusi dan saran – saran yang diberikan pada individu pada lingkungan keluarga berdasarkan hasil dari proses konsultasi, konseling dan percakapan yang telah dilakukan.

LK3 adalah Lembaga atau organisasi yang memberikan layanan konseling, konsultasi, pemberian informasi, pengajuan, perlindungan, dan pendampingan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran terhadap lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan LK3 Tujuannya untuk Memberikan pelayanan sosial keluarga bagi masyarakat, karyawan, dan instansi / organisasi, meningkatkan kemampuan keluarga untuk memecahkan masalah dan melaksanakan fungsi sosial secara memadai, memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan upaya-upaya pemecahan masalah keluarga, menumbuhkan kepedulian keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi terhadap permasalahan keluarga dan cara mengatasinya sehingga dapat berperan serta secara aktif.

Dalam Proses intervensi LK3 mempunyai sasaran dalam penanganan masalah-masalah sosial dalam bentuk konsultasi dan konseling terhadap Individu, keluarga, kelompok instansi (insitusi) dan organisasi yang membutuhkan informasi untuk mengatasi masalah keluarga. Keluarga yang membutuhkan pelayanan advokasi sosial. Keluarga yang mengalami masalah psikososial. Masyarakat atau karyawan / pekerja pada instansi / organisasi. Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) memberikan pelayanan-pelayanan kepada lingkungan keluarga berupa Konseling, memberikan bantuan pelayanan kepada keluarga yang

mengalami masalah psikososial. Konsultasi, memberikan bantuan penasehatan keluarga, kelompok, masyarakat, dan organisasi oleh seseorang atau tim yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi profesional yang memadai. Pemberian informasi, berkaitan dengan isu dan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga serta informasi bagi pihak yang ingin berpartisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial. Penjangkauan, kegiatan pembimbingan sosial kelompok dan menemukan kasus-kasus. Perlindungan, memberikan bantuan perlindungan sehingga keluarga terhindar dari kerentanan yang dialaminya. Pendampingan, memberikan pelayanan lanjutan kepada sasaran. Rujukan, memberikan rekomendasi kepada insitusi/ lembaga yang sesuai dengan masalah yang di alami oleh sasaran.

5. Proses Intervensi Pekerjaan Sosial

Bentuk nyata kegiatan praktek pekerja sosial disebut dengan pelaksanaan intervensi, pelaksanaan intervensi adalah tindakan nyata atau kongkrit dari pekerja sosial. Intervensi merupakan tahap penting dari pekerja sosial dalam melakukan intervensi ini pekerja sosial tentunya membutuhkan kerjasama dari kelayan, juga tentunya kerjasama dari berbagai pihak. Dalam Jusman (2013:65) tentang tahap-tahap intervensi (proses pertolongan) pekerjaan sosial dapat dijelaskan berikut ini:

a. Tahap Engagement, Intake dan Kontak.

Tahap ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang dapat diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan klien. Dengan demikian terjadilah proses saling mengenal dan tumbuhnya kepercayaan klien kepada pekerja sosial. Dengan kondisi semacam itu maka pekerja sosial dapat menciptakan relasi pertolongan profesional yaitu sebagai suatu pola ekspektasi, interaksi dan interdependensi yang bersifat resiprokal antara pekerja sosial dengan klien, di masa pekerja sosial

menyediakan dan menggunakan sumber-sumber tertentu untuk membantu klien dan klien dapat menggunakan sumber-sumber tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada akhirnya dapatlah dibuat suatu kontak antara pekerja sosial dengan klien. Kontak adalah kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien yang di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dan klien, metode-metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan-pengaturan pertolongan lainnya.

b. Tahap Asesmen

Asesmen merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah klien, yang meliputi: bentuk masalah, ciri-ciri masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah terdahulu yang pernah dilakukan klien, kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan hal itu semua maka dapatlah ditetapkan fokus atau akar masalah klien. Dalam melakukan asesmen ini pekerja sosial dapat mempergunakan teknik-teknik wawancara, observasi, dan teknik pengumpulan data lainnya yang dianggap tepat.

c. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi

Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut, siapa sasarannya serta bagaimana cara memecahkan masalah tersebut di masa mendatang. Rencana intervensi disusun dan dirumuskan haruslah berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan sebelumnya oleh pekerja sosial. Pada garis besarnya rencana intervensi memuat hal-hal berikut ini:

- Fokus/ akar masalah klien.

- Tujuan pemecahan masalah klien berikut indikator-indikator keberhasilannya.
- Sistem dasar praktek, yang meliputi: sistem klien, sasaran, pelaksana perubahan, kegiatan.
- Pokok-pokok program kegiatan pemecahan masalah yang meliputi tahapan-tahapan:
 1. Tugas-tugas motivasi yaitu menghilangkan faktor-faktor penyebab masalah klien, memperbaiki motif-motif klien yang rusak dan mengarahkan perilaku klien pada tujuan perubahan.
 2. Tugas-tugas yang berkaitan dengan upaya memberikan dan meningkatkan kemampuan-kemampuan klien yang meliputi dimensi: pengetahuan, keterampilan berkomunikasi dan berelasi dan interaksi, pengalaman-pengalaman dan keahlian kegunaan kerja.
 3. Tugas-tugas yang berkaitan dengan menciptakan kesempatan, yaitu merubah lingkungan sosial klien sehingga dapat mendorong dan menerima penampilan peran-peran sosial klien.
 4. Tugas-tugas yang berkaitan dengan menciptakan kesempatan, yaitu merubah lingkungan sosial klien sehingga dapat mendorong dan menerima penampilan peran-peran klien.
 5. Tugas-tugas memobilisasi sumber-sumber yang dapat dijangkau dan digunakan oleh klien untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanannya serta memecahkan masalah-masalahnya.
 6. Tugas-tugas yang berkaitan dengan upaya untuk memelihara dan menetapkan perubahan-perubahan yang telah dicapai oleh klien.
- Metode-metode pertolongan yang digunakan untuk memberikan pertolongan kepada klien, yang mencakup antara lain:

1. Model-model pendekatan yang digunakan.
 2. Metode dan teknik pertolongan.
 3. Strategi dan taktik pertolongan
- Tahap pelaksanaan intervensi atau pemecahan masalah klien.

d. Tahap melaksanakan program

Berdasarkan rencana intervensi di atas maka selanjutnya pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien. Dalam pelaksanaan pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap tahapan.

e. Tahap evaluasi

Pada tahap ini pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan pertolongan yang telah dilakukannya untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalannya atau hambatan-hambatan yang terjadi. Ada dua aspek yang harus dievaluasi oleh klien, yaitu tujuan hasil dan tujuan proses.

f. Tahap terminasi (Pengakhiran/Pemutusan kegiatan pertolongan)

Tahap terminasi dilakukan bilamana tujuan pertolongan telah dicapai atau bilamana terjadi kegiatan *referral* atau bilamana karena alasan-alasan yang rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor-faktor eksternal yang dihadapi pekerja sosial atau karena klien lebih baik dialihkan kepada lembaga-lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten.

Proses intervensi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) dalam memberikan pelayanan sosialnya yaitu dalam tahap awal melakukan Kontak awal dengan individu atau keluarga dengan bertujuan untuk menjalin hubungan yang

baik dan kepercayaan klien terhadap pihak pemberian pelayanan sosial. Proses selanjutnya yaitu proses Identifikasi kasus, dalam proses ini pihak LK3 mengarahkan pembicaraan dalam ruang lingkup permasalahan klien sehingga dalam proses ini diharapkan klien mampu dalam memaparkan permasalahan yang ada pada dirinya dengan cara menceritakan apa yang dialaminya, sehingga dalam hal ini pekerja sosial atau pihak dari LK3 diharapkan lebih teliti dan mampu dalam mengambil inti dari pembicaraan tersebut untuk dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut. Dalam proses intervensi LK3 ini maka diperlukan dalam menelaah proses rencana intervensinya yaitu antara lain:

- Pengumpulan data dan informasi tentang kondisi aktual keluarga yang sangat mengalami masalah sosial psikologis dan masyarakat pada umumnya oleh instansi sosial tingkat Provinsi.
- Analisis data guna penentuan jenis dan besaran kebutuhan keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis oleh instansi sosial tingkat provinsi
- Penyusunan rencana pendirian yang meliputi penentuan lokasi, menentukan sarana dan prasarana, menentukan waktu, membuat struktur organisasi dan menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan komitmen untuk membantu upaya penyelesaian masalah keluarga oleh instansi sosial tingkat provinsi bersama dengan instansi sosial tingkat kabupaten.
- Sosialisasi rencana pendirian LK3 oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cimahi kepada masyarakat
- Mobilisasi dukungan dari pihak terkait yang terdiri dari tokoh masyarakat, Akademisi, aparat pemerintah sampai sampai dengan tingkat kelurahan/desa, LSM/Orsos, dan jaringan kerja lain seperti Rumah Sakit, Kepolisian dan LBH.
- Pembuatan komitmen dari berbagai pihak terkait untuk mendukung pembentukan LK3.

- Peresmian pendirian LK3 yang dikukuhkan melalui SK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cimahi dan yang dihadiri oleh pihak terkait serta kelompok sasaran.

6. Tugas Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial dalam melaksanakan tugas nya diperlukan adanya ketelitian dalam mengambil tindakan karena hal ini bertujuan dalam meningkatkan kualitas dan proses pertolongan yang diberikan kepada klien dalam proses penanganan masalahnya. Menurut Schwartz dalam Suharto (2014:69), mengemukakan tentang tugas pekerjaan sosial yang dapat dilaksanakan untuk pengembangan masyarakat dan dapat diterapkan pada program LK3 yaitu:

1. Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka.
2. Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat banyak orang dan membuat frustrasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh (*significant others*) terhadap mereka.
3. Memberi kontribusi data mengenai ide-ide, fakta, nilai, konsep yang tidak dimiliki masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi relitas sosial dan masalah yang dihadapi mereka.
4. Membagi visi kepada masyarakat; harapan dan aspirasi pekerja sosial merupakan intervensi bagi interaksi antara orang dan masyarakat dan bagi kesejahteraan individu dan sosial.
5. Mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan mana sistem relasi antara pekerja sosial dan masyarakat dibentuk. Aturan-aturan tersebut membentuk konteks bagi kontak kerja yang mengikat masyarakat dan lembaga. Batasan-batasan tersebut juga mampu menciptakan kondisi yang dapat

membuat masyarakat dan pekerja sosial menjalankan fungsinya masing-masing.

Dari penjelasan di atas menyebutkan bahwa tugas pekerjaan sosial dapat diterapkan dalam proses pelayanan LK3 dalam memberikan proses pertolongan yang dilakukan oleh pekerja sosial yang dilakukan kepada klien yang mengalami masalah sosial sehingga dalam hal ini diharapkan dengan adanya proses pertolongan yang dilakukan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh klien. Bentuk dari proses pertolongan yang dilakukan oleh pekerja sosial dilakukan berdasarkan keterampilan-keterampilan, pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh pekerja sosial.

7. Strategi Pemberdayaan Pekerja Sosial

Pekerja sosial dalam melakukan pemberdayaan masyarakat harus ada strategi yang digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan serta agar pemberdayaan yang dilakukan dapat tertuju dan terlaksana dengan baik pada masyarakat. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individu; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam artian mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerja sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga azas atau matra pemberdayaan: *mikro*, *mezzo*, dan *makro*. Menurut Parson dalam Suharto (2014:66) mengungkapkan tentang aras pemberdayaan pekerja sosial yaitu:

- a. Azas *mikro*, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress mangement, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tuga-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas.
- b. Azas *mezzo*, pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok klien. Pemberdayaan

dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

- c. Azas *makro*. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, perorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memiliki serta menentukan strategis yang tepat untuk bertindak.

C. Kesimpulan

Pekerja sosial dalam melakukan strategi pemberdayaan masyarakat khususnya pada program lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) dapat menggunakan azas *mikro* karena dalam proses intervensinya dalam LK3 ini dilakukan proses konsultasi, konseling dan pemberian informasi terhadap individu tersebut atau pun terhadap keluarga yang bersangkutan.

Konsultasi yang diberikan terhadap klien bagi dan keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis dalam keluarganya, yang mengganggu pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai pribadi, anggota keluarga, dan anggota kelompok sosial lainnya. Masalah psikologis keluarga dapat muncul dan berkembang dikarenakan kurangnya penanaman budi pekerti dan pengaruh berbagai budaya luar serta mudahnya mengakses secara bebas arus informasi yang berkaitan erat dengan perubahan pola sikap dan perilaku seseorang.

Pekerja sosial pada lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) harus memiliki keterampilan – keterampilan dalam dirinya karena dengan memiliki keterampilan maka akan mempermudah dalam proses konsultasi, konseling, pemberian informasi terhadap klien sehingga dalam menggali suatu permasalahan klien bisa dilakukan dengan mudah untuk memberikan proses pertolongan pada klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Ribka. 2005. “Pengelolaan Program Layanan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga pada Keluarga Bermasalah di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekarsari Yogyakarta.” *Universitas Negeri Yogyakarta*:261–270.
- Soekanto, Soerjono, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soehartono, Irawan, 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Adi, Isbandi, Rukminto, 2013. *Kesejahteraan sosial*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2009. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Soetomo, 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soetomo, 2013. *Masalah Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetarso, 2008. *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial, Kebijakan Sosial*, Kopma STKS, Bandung.
- Syam. W, Nina, 2013. *Psikologi Sosial*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Iskandar, Jusman, 2013. *Supervisi Pekerjaan Sosial*. Bandung: Puspaga Bandung.
- Suharto, Edi, 2014. *Pekerjaan Sosial Di dunia Industri*. Bandung: Alfabeta .
- Achlis, Abu. 2009. *Psikologi Umum*. Jakarta : Reika Cipta.
- Suharto, Edi, 2014. *Membangun Masyarakat Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Refika Aditama.
- Iskandar, Jusman, 2011. *Membangun Kekuatan Masyarakat*. Bandung: Puspaga Bandung.
- Sarwono W, Sarlito, 2013. *Psikologi Umum*. Depok : Rajawali Pers.
- Sztomka, Piotr, 2014. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Willis, S. Sofyan, 2009. *Konseling Individual*. Bandung: Alfabeta.

- Corey, Gerald, 2013. *Theory And Practice Of Counseling And Psychotherapy*. Bandung: Refika aditama.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2014. *Pemikiran-pemikiran dalam pembangunan kesejahteraan sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2009. *Pengembangan sumber daya manusia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Rahman, Reza. 2009. *Corporate Social Responsibility (antara teori dan kenyataan)*. Yogyakarta: Medpress
- Fatimah, Enung. 2010. *Psikologi perkembangan*. Bandung: Pustaka Setia
- Ali, Mohammad,. Mohammad Asrori. 2014. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Bumi Aksara
- <http://repository.unpas.ac.id/28073/>
- <https://kemsos.go.id/ilm-lembaga-konsultasi-kesejahteraan-keluarga-lk3>
- <https://www.kompasiana.com/pakcah/575540b2d77a614f0662e2ae/inilah-pertolongan-pertama-pada-keluarga-bermasalah?page=all#>
- <http://dinsos.serangkab.go.id/menu-lk3-surosowan.html>